



## Eksplorasi Peran Informasi Akuntansi Manajemen, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kinerja UMKM

Putri Nugrahaningsih<sup>1)</sup>

E-mail Korespondensi: putrinugraha@student.uns.ac.id<sup>1)\*</sup>

Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia<sup>1)</sup>

### INFO ARTIKEL

*Proses Artikel*

Dikirim : 09/11/2024

Diterima: 19/11/2024

Dipublikasikan: 19/11/2024

Akreditasi oleh  
Kemenristekdikti  
No.79/E/KPT/2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga mengenai integrasi akuntansi manajemen dan biaya kepatuhan pajak dalam meningkatkan kinerja UMKM, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat meningkatkan kinerja keuangan dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas di Surakarta. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan analisis kualitatif yang diadopsi dengan wawancara mendalam secara tatap muka dengan informan yang merupakan pemilik dan pejabat pemerintah yang menaungi UMKM. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) harus memperhatikan informasi akuntansi manajemen dan biaya kepatuhan pajak untuk tujuan perencanaan kinerja. Pengaruh informasi akuntansi manajemen dan biaya kepatuhan pajak terhadap kinerja UMKM sangat signifikan. Dengan informasi ini, UMKM dapat mengukur kinerja melalui perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan operasional serta keputusan yang berdampak pada efisiensi dan profitabilitas. Atas latar belakang tersebut, sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM harus dapat membuat keputusan akuntansi manajemen yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis berdasarkan informasi yang akurat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pihak eksternal. Untuk membuat keputusan yang efektif, informasi tentang strategi akuntansi manajemen mencakup strategi persaingan, strategi pengembangan bisnis, dan strategi penganggaran yang didukung dengan perencanaan pajak yang baik.

### Kata Kunci :

Akuntansi manajemen; kepatuhan pajak; kinerja UMKM.

### ABSTRACT

*This research aims to provide valuable insights into the integration of management accounting and tax compliance costs in improving the performance of MSMEs, identifying best practices that can improve*

*financial performance and ultimately contribute to broader economic development in Surakarta. The research used a case study method with a qualitative analysis approach adopted by in-depth face-to-face interviews with informants who are owners and government officials who oversee MSMEs. This study found that small and medium enterprises (SMEs) should pay attention to management accounting information and tax compliance costs for performance planning purposes. The effect of management accounting information and tax compliance costs on MSME performance is significant. With this information, MSMEs can measure performance through planning, controlling, and evaluating operational activities and decisions that have an impact on efficiency and profitability. For this background, human resources who have accounting competencies are urgently needed. The results of this study indicate that MSME owners must be able to make management accounting decisions that are useful for strategic decision-making based on accurate information. This aims to create value, improve performance, and improve the welfare of employees and external parties. To make effective decisions, information about management accounting strategies includes competitive, business development, and budgeting strategies supported by good tax planning.*

**Keywords:**

*Management accounting; tax compliance; MSME performance*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah telah menjadi komponen penting dalam lanskap ekonomi, memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan, mendorong inovasi, dan menciptakan peluang kerja di berbagai industri dan pasar bisnis (Zaid & Yaqub, 2024). Sekitar 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Dengan kontribusi yang signifikan, sekitar 60,5%, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara karena peran dominan mereka. Selain itu, UMKM adalah penyedia utama lapangan kerja di Indonesia, dengan menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja (Binus University, 2020). Akuntansi manajemen adalah komponen penting dalam pengambilan keputusan manajerial untuk membantu memandu keseluruhan strategi bisnis secara keseluruhan dalam organisasi. Pengukuran yang tepat atas praktik akuntansi manajemen memungkinkan para akademisi dan praktisi untuk menilai penerapannya pada organisasi secara efektif (Qiu et al., 2023). Pentingnya informasi akuntansi manajemen sangat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam proses pengambilan keputusan mereka, karena meningkatkan transparansi keuangan dan memfasilitasi perencanaan strategis. Secara umum, sistem akuntansi tidak hanya bertanggung jawab untuk memfasilitasi keputusan yang berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen rasionalisasi untuk keputusan yang telah dibuat. Secara khusus, sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang penting bagi para manajer untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sistem ini juga mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan informasi untuk pengukuran kinerja, proses perbaikan berkelanjutan, dan optimalisasi sumber daya. Oleh karena itu, sistem akuntansi manajemen adalah instrumen akuntansi yang menilai kebutuhan sumber daya dan apakah sumber

daya dialokasikan secara efisien dan efektif (Latif et al., 2023). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa pemilik UKM dapat mengambil manfaat dari sistem akuntansi manajemen dalam meningkatkan kinerja bisnis dan mengatasi masalah keberlanjutan dan kelangsungan hidup. *Management accounting systems* (MAS) dapat memastikan keberhasilan keuangan yang berkelanjutan, namun literatur yang ada masih sedikit mengenai bagaimana sistem akuntansi manajemen berperan dalam meningkatkan keberlanjutan ekonomi UKM (Latif et al., 2023), (Alawattage & Wickramasinghe, 2022).

Akuntansi manajemen membantu menyeimbangkan tujuan pajak dengan mengelola risiko yang disebabkan adanya tindakan minimalisasi pajak yang dapat meningkatkan laba bersih jangka pendek, namun pendekatan ini menghasilkan biaya non-pajak seperti risiko reputasi atau kemungkinan konflik dengan otoritas pajak (Rengganis & Soetardjo, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, minimalisasi pajak perusahaan telah menimbulkan perdebatan publik yang signifikan, dengan pemerintah meninjau kembali peraturan pajak global dalam konteks kebijakan ini. Sementara komponen utama dari saran yang dicari dari, dan disediakan oleh, kantor akuntan profesional merupakan panduan strategis yang bertujuan untuk meminimalkan biaya pajak, bisnis dan akuntan profesional mereka telah mulai membingkai pajak sebagai bentuk sosial (Anesa & Bressan, 2024). Selain itu, pemahaman yang komprehensif tentang biaya kepatuhan pajak dapat secara signifikan mempengaruhi profitabilitas, dalam studi ini menemukan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya sekedar pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga mengenai faktor kontekstual dan dinamika hubungan para pelaku di bidang perpajakan (Yong & Fukofuka, 2023). Pajak adalah masalah utama bagi manajemen UKM, mengingat pentingnya manajemen arus kas dan kendala pendanaan yang menjadi ciri khas jenis perusahaan ini. UKM dapat menggunakan penghindaran pajak sebagai mekanisme untuk meningkatkan arus kas setelah pajak yang diharapkan dan dengan demikian mengurangi leverage dan memiliki tingkat kelonggaran keuangan yang lebih tinggi. Namun pada saat yang sama, penghindaran pajak juga mahal, karena dapat meningkatkan risiko yang dirasakan oleh penyedia dana, mengingat strategi penghindaran pajak dapat dikaitkan dengan ketidakjelasan perusahaan, pengalihan sewa manajerial, dan volatilitas arus kas, di samping kemungkinan penalti oleh otoritas pajak (Hasan et al., 2014). Pada penelitian Barrios et al. (2020), menunjukkan bahwa perubahan biaya kepatuhan pajak yang disebabkan oleh harmonisasi basis pajak perusahaan akan memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap produk domestik bruto (PDB) dan kesejahteraan serta mengilustrasikan mekanisme perubahan yang akan terjadi tergantung pada tingkat awal dan perbedaan biaya kepatuhan pajak. Variasi dalam biaya kepatuhan akan secara langsung mempengaruhi permintaan tenaga kerja karena biaya kepatuhan diwakili oleh jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan kepatuhan pajak. Penelitian Azmi et al. (2016) memberikan kontribusi pada literatur dengan menguji secara empiris persepsi UKM terhadap biaya kepatuhan pajak sebagai faktor penting dalam adopsi sistem akuntansi. Penelitian kami mencoba untuk memposisikan biaya kepatuhan pajak dalam kerangka kerja adopsi TI untuk UKM. Dengan demikian, kami memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sistem informasi akuntansi oleh UKM. Dengan kata lain, alih-alih berfokus secara eksklusif pada biaya kepatuhan pajak sebagai satu-satunya faktor dalam adopsi UKM terhadap sistem akuntansi, kami memeriksa pengaruh biaya kepatuhan pajak sebagai salah satu faktor dalam adopsi TI. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada praktik dengan memberikan pemahaman kepada para manajer dan tim manajemen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sistem akuntansi. Pemahaman ini memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan yang tepat mengenai integrasi dan penggunaan sistem yang patuh pajak dalam sistem akuntansi organisasi mereka, terutama pada tahap awal adopsi sistem. Studi sebelumnya yang dilakukan Panggiarti et al. (2023) menemukan bahwa pengelola UMKM harus memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi akuntansi manajemen strategis saat membuat keputusan strategis. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk menciptakan nilai, meningkatkan kinerja, dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dalam akuntansi manajemen strategis, informasi tentang strategi kompetitif, pengembangan usaha, dan pelaksanaan strategi adalah bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Teknik-teknik seperti *costing* berbasis aktivitas dan *balanced scorecard*

membantu melakukan ini. Namun, sistem akuntansi manajemen strategis tidak cukup tanpa perencanaan pajak yang baik karena pajak yang tidak direncanakan dapat menjadi beban yang mengurangi keuntungan. Teori Kontingensi dalam penelitian (Oyewo, 2022) akan digunakan untuk menjelaskan fakta ini, yang menjelaskan tentang berbagai faktor kontijensi yang memengaruhi adopsi inovasi akuntansi manajemen. Variabel kontijensi internal termasuk struktur organisasi, teknologi informasi, strategi bisnis, dan orientasi pasar; dan variabel kontijensi eksternal termasuk kompetisi pasar dan ketidakpastian lingkungan yang dirasakan. Dalam penelitian ini, teori kontijensi juga akan diterapkan untuk menjelaskan bagaimana penggunaan akuntansi manajemen strategi dipengaruhi oleh biaya kepatuhan pajak.

Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi hubungan antara informasi akuntansi manajemen dan biaya kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks UMKM di Surakarta. Penelitian ini sangat penting, karena akan menjelaskan bagaimana praktik akuntansi manajemen dapat disesuaikan untuk memenuhi tantangan berbeda yang dihadapi oleh UMKM di wilayah ini, terutama terkait kewajiban dan kepatuhan pajak. Dengan memahami dinamika ini, para pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan, pemilik bisnis, dan penasihat keuangan dapat bekerja secara kolaboratif untuk mengembangkan strategi yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga tentang integrasi akuntansi manajemen dan kepatuhan pajak dalam UMKM, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat meningkatkan kinerja keuangan dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas di wilayah tersebut. Dengan meneliti kasus-kasus dunia nyata dan data empiris, penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi pada wacana akademis tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi para praktisi UMKM di Surakarta. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, memberdayakan UMKM untuk memanfaatkan informasi akuntansi manajemen dalam mengoptimalkan strategi perpajakan mereka, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan efektivitas operasional mereka secara keseluruhan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pentingnya Informasi Akuntansi Manajemen bagi UMKM**

Secara umum, sistem akuntansi tidak hanya bertanggung jawab untuk memfasilitasi keputusan yang berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen rasionalisasi untuk keputusan yang telah dibuat. Secara khusus, sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang penting bagi para manajer untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sistem ini juga mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan informasi untuk pengukuran kinerja, proses perbaikan berkelanjutan, dan optimalisasi sumber daya. Oleh karena itu, sistem akuntansi manajemen adalah instrumen akuntansi yang menilai kebutuhan sumber daya dan apakah sumber daya dialokasikan secara efisien dan efektif (Latif et al., 2023).

Informasi akuntansi manajemen sangat penting bagi UMKM karena membantu dalam perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Dengan memanfaatkan data keuangan yang akurat, perusahaan-perusahaan ini dapat membuat keputusan yang tepat yang selaras dengan tujuan bisnis mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memantau kinerja, menilai profitabilitas, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, praktik akuntansi manajemen yang efektif dapat memberdayakan UMKM untuk merampingkan operasi, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Integrasi informasi akuntansi manajemen ini menumbuhkan budaya akuntabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di dalam sektor ini dengan merangkul alat-alat ini, UMKM (Alsharari & Lasyoud, 2019)

*Institute of Management Accountants* (IMA) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai “profesi yang melibatkan kemitraan dalam pengambilan keputusan manajemen, merancang perencanaan dan sistem manajemen kinerja, dan menyediakan keahlian dalam pelaporan dan pengendalian keuangan untuk membantu manajemen dalam perumusan dan implementasi strategi

organisasi.” Dengan demikian, akuntansi manajemen merujuk pada praktik-praktik yang memfasilitasi proses akuntansi manajemen, seperti penganggaran dan penetapan biaya. Dalam beberapa literatur mengukur praktik akuntansi manajemen dengan menggunakan pendekatan survei. Namun, survei memiliki potensi bias yang berasal dari tingkat respons yang rendah dan pendapat subjektif dari responden (Qiu et al., 2023).

Penelitian (Ghasemi et al., 2016), salah satu fungsi sistem informasi akuntansi manajemen adalah memberi manajer informasi yang diperlukan untuk mengawasi aktivitas mereka. Informasi ini sangat penting bagi bisnis dalam merencanakan, membuat keputusan, dan mengawasi organisasi. Karena usaha mikro, kecil, dan menengah sangat kompetitif, sehingga harus dipahami dengan keterbatasannya, yang ditunjukkan dalam unit usaha yang diukur berdasarkan peningkatan kapasitas permodalan, produk-produk yang rencana untuk dipasarkan.

Diskusi tentang masalah unit, yaitu masalah sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi produksi. Ada beberapa masalah yang sering dibicarakan. Dalam masalah yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah (UMKM), seperti keterbatasan modal finansial, struktur dan infrastruktur atau disebut modal fisik dan kendala pemasaran produk. Seperti yang dijelaskan oleh (Hansen & Mowen, 2015), sistem informasi akuntansi manajemen pasti tidak terlibat dengan persyaratan formal untuk menjelaskan input, atau masukan, dan keluaran, atau output. Menurut PP UMKM No. 7 Tahun 2021 (Republik Indonesia, 2021), kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dibedakan dalam berbagai kategori. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, strategi sangat penting (Refiyanto & Muid, 2022).

### **Pemahaman Biaya Kepatuhan Pajak dan Kinerja UMKM**

Untuk biaya kepatuhan pajak, penelitian (Halabi et al., 2010) menunjukkan bahwa penggunaan atau adopsi sistem akuntansi menunjukkan bahwa aktivitas kepatuhan pajak merupakan salah satu alasan di balik adopsi atau penggunaan sistem akuntansi oleh UKM. Namun, tidak ada penelitian adopsi TI yang secara empiris memverifikasi atau mengukur peran aktivitas kepatuhan pajak dalam studi adopsi sistem akuntansi. Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, aktivitas kepatuhan pajak ini dapat diukur dengan biaya yang dikeluarkan, biaya ini merupakan atribut perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan adopsi.

UMKM dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk inovasi dan ekspansi dengan mengelola kepatuhan pajak secara efektif. Selain itu, pemahaman yang jelas tentang kewajiban perpajakan mendorong transparansi dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, yang berujung pada hubungan yang lebih baik dengan lembaga keuangan dan calon investor. Dengan mengurangi biaya kepatuhan, UMKM dapat memposisikan diri mereka dengan lebih baik untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, pada penelitian (Azmi et al., 2016) memberikan kontribusi pada literatur dengan menguji secara empiris persepsi UKM terhadap biaya kepatuhan pajak sebagai faktor penting dalam adopsi sistem akuntansi. Penelitian kami mencoba untuk memposisikan biaya kepatuhan pajak dalam kerangka kerja adopsi TI untuk UKM. Dengan demikian, kami memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sistem informasi akuntansi oleh UKM. Dengan kata lain, alih-alih berfokus secara eksklusif pada biaya kepatuhan pajak sebagai satu-satunya faktor dalam adopsi UKM terhadap sistem akuntansi, kami memeriksa pengaruh biaya kepatuhan pajak sebagai salah satu faktor dalam adopsi TI. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada praktik dengan memberikan pemahaman kepada para manajer dan tim manajemen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sistem akuntansi. Pemahaman ini memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan yang tepat mengenai integrasi dan penggunaan sistem yang patuh pajak dalam sistem akuntansi organisasi mereka, terutama pada tahap awal adopsi sistem.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam prosesnya, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan baik dengan lisan maupun tulisan yang direkam dan prosesnya dilakukan dengan studi mendalam dan terperinci terhadap kasus tertentu. Informan disini adalah pemilik UMKM di Surakarta yang berlokasi di Banjarsari, Jebres, dan Ketingan. Selain itu informan berasal dari perwakilan instansi pemerintah yang menaungi UMKM meliputi pihak Pusat Layanan Usaha Terpadu dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber, seperti pengamatan langsung atau partisipan, wawancara, catatan arsip atau dokumen, dan analisis visual. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria tertentu yang disebut *purposive sampling*, yang mana dipilih dengan pertimbangan tertentu, seperti lokasi UMKM dibatasi wilayah tertentu, apakah UMKM telah memiliki laporan keuangan yang terstruktur, kemudian apakah UMKM secara rutin membayar pajak sesuai ketentuan (Creswell, 2015). Dalam hal pengambilan sampling, penulis melakukan distribusi kuesioner dalam bentuk *google form* ke responden UMKM yang berada di Banjarsari dan Jebres untuk memetakan UMKM yang sesuai kriteria untuk dijadikan informan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan yang terpilih dan melakukan pengamatan langsung ke lokasi UMKM.

Aspek yang ditanyakan dalam wawancara seperti omzet, *marketing chanel*s, jumlah staf, persaingan di pasar, dan jumlah pelatihan dan penyuluhan teknologi informasi dan sosialisasi perpajakan yang diikuti, serta dana hibah bantuan dari pemerintah.

Selanjutnya, pertanyaan tersebut terkait aspek informasi akuntansi manajemen termasuk strategi kompetitif, pengembangan bisnis, perubahan pasar, program startegi korporat, implementasi strategi, dan pengendalian strategi. Peneliti akan membandingkan pernyataan informan dengan aspek informasi akuntansi manajemen untuk mengetahui apakah ada kesesuaian. Setelah itu, analisis lebih lanjut akan dilakukan.

Akuntansi manajemen bisa diibaratkan sebagai "kompas" bisnis bagi pelaku UMKM. Pada dasarnya, akuntansi manajemen adalah cara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data keuangan dan operasional untuk membantu pengambilan keputusan dalam bisnis sehari-hari. Untuk UMKM, ini berarti membantu mereka melihat dengan jelas hal-hal seperti 1) biaya produksi dan laba, dengan menghitung berapa biaya untuk membuat produk atau menyediakan jasa, UMKM bisa mengetahui berapa harga yang wajar agar tetap untung; 2) arus kas dan pengelolaan uang, hal ini membantu UMKM mengatur kapan uang masuk dan keluar, serta menghindari masalah keuangan yang sering terjadi karena kurangnya uang tunai; 3) perencanaan dan pengendalian, akuntansi manajemen memungkinkan pemilik UMKM untuk merencanakan anggaran dan mengendalikan pengeluaran, memastikan bisnis tetap sehat serta pengambilan keputusan strategis, dengan memiliki data yang akurat, UMKM bisa membuat keputusan yang tepat, seperti apakah perlu menambah produk baru atau fokus ke produk yang paling laris (Hadid & Al-Sayed, 2021).

Selain aspek informasi akuntansi manajemen, peneliti menanyakan tentang aspek kepatuhan pajak, hal ini dikaitkan dengan biaya kepatuhan pajak yang merupakan semua biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak. Dalam konteks UMKM, ini mencakup biaya yang timbul agar mereka bisa patuh pada aturan pajak yang berlaku.

Secara sederhana, biaya kepatuhan pajak bisa dibagi menjadi: biaya langsung, termasuk biaya untuk membayar jasa konsultan pajak atau akuntan yang membantu UMKM menghitung, menyusun, dan melaporkan pajak dengan benar; biaya tidak langsung, waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan karyawannya untuk mengurus pajak, misalnya, waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data, membuat laporan, atau melakukan pembayaran pajak; dan yang terakhir adalah biaya administrasi, yang mana pelaku usaha perlu membeli *software* atau alat bantu lain untuk membantu pelaporan pajak, atau mungkin perlu pelatihan tentang cara melaporkan pajak dengan benar. Biaya kepatuhan pajak ini penting untuk diperhitungkan karena,

meskipun biaya ini mungkin terasa sebagai pengeluaran tambahan, kepatuhan pajak membantu UMKM terhindar dari denda dan masalah hukum di kemudian hari.

Kinerja UMKM dapat didefinisikan sebagai hasil dari kemampuan UMKM untuk mencapai tujuan strategisnya melalui efektivitas dan efisiensi operasi bisnis, yang mencakup aspek keuangan (seperti pendapatan dan laba) dan non-keuangan (seperti kualitas produk dan kepuasan pelanggan). Kinerja ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu informasi akuntansi manajemen, informasi ini mendukung UMKM dalam memantau biaya dan profitabilitas secara akurat serta membuat keputusan untuk meningkatkan daya saing dan biaya kepatuhan pajak yang mengacu pada biaya dan upaya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Savvakis et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### UMKM Kota Surakarta

Perkembangan UMKM di Surakarta atau Kota Solo menunjukkan tren positif, dengan peningkatan signifikan dalam jumlah pelaku usaha dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta mencatat adanya lonjakan dari 3.635 unit usaha pada 2021 menjadi 11.157 unit pada 2022. Dari jumlah ini, sebagian besar adalah usaha mikro dengan 11.138 unit, sementara usaha kecil ada 18 unit dan usaha menengah 3 unit. Distribusi UMKM tersebar di lima kecamatan, dengan proporsi terbesar di Pasar Kliwon (26,61%) dan Serengan (24,81%) (Primasasti, 2023).

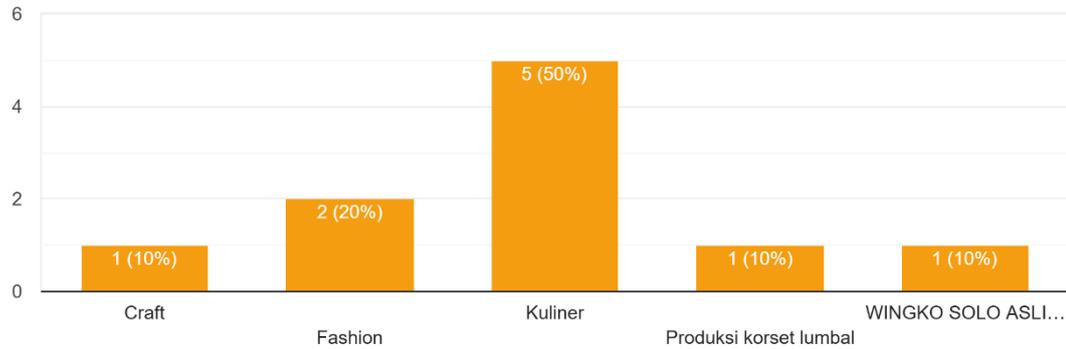
Pemerintah Kota Surakarta turut berperan aktif dalam mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis. Acara Ngarsopuro *Night Market* juga menjadi salah satu inisiatif yang digemari, menawarkan tempat bagi UMKM untuk mempromosikan produk mereka dan berinteraksi dengan konsumen. Pada tahun 2023, UMKM di Kota Surakarta menunjukkan perkembangan yang positif meskipun menghadapi beberapa tantangan ekonomi. Kota Surakarta tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,57%, yang sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,25%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah sektor akomodasi dan makanan/minuman, dengan kenaikan hingga 11,6%, sementara konsumsi rumah tangga meningkat 5,68% (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2024). Jumlah total UMKM di Surakarta juga telah bertambah dengan variasi jenis usaha yang tersebar di seluruh kecamatan. Upaya ini menunjukkan kontribusi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah, yang tercermin dalam peningkatan omzet dan kemampuan mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal di tengah tantangan inflasi dan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.

### Responden berdasarkan kategori

Responden pada penelitian ini adalah UMKM di Surakarta, yang berada di kawasan Banjarsari dan Jebres, berikut hasil pengumpulan data berdasarkan kriteria UMKM yang sudah menerapkan akuntansi manajemen dalam operasional bisnis sehari-hari dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan usaha UMKM-nya. Kemudian, dari sini digunakan untuk memilih informan yang sesuai untuk diwawancarai. Selain UMKM, informan dari pemerintah juga akan diwawancarai seperti dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Surakarta. Berikut gambar grafik hasil pendataan UMKM berdasarkan kategori jenis usaha, lama usaha, pencatatan laporan keuangan, kepatuhan perpajakan, dan pelatihan sistem informasi akuntansi manajemen dan sejenisnya.

Apa jenis usaha yang dijalankan oleh UMKM Anda?

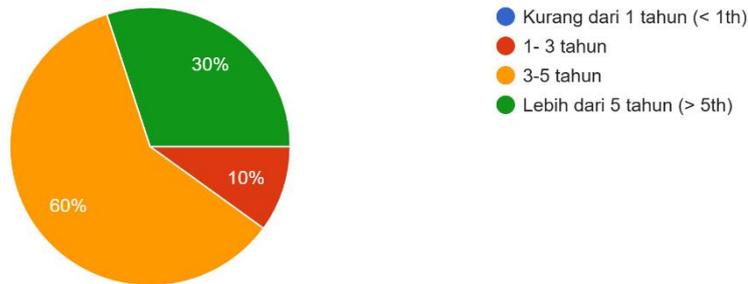
10 responses



**Gambar 1. Jenis usaha UMKM**  
Sumber: kuesioner (tanggapan *google form*)

Sudah berapa lama UMKM Anda beroperasi?

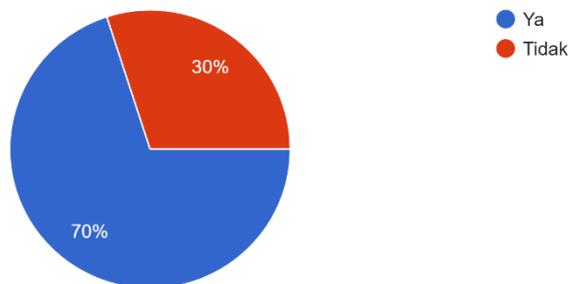
10 responses



**Gambar 2. Lama usaha**  
Sumber: kuesioner (tanggapan *google form*)

Apakah UMKM Anda telah memiliki laporan keuangan yang terstruktur?

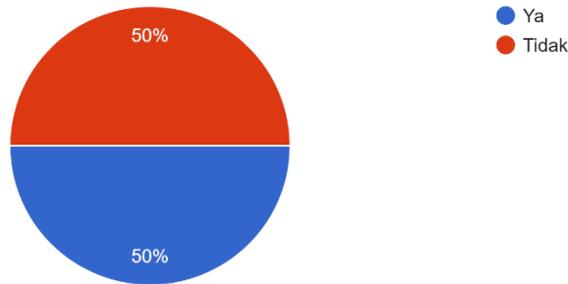
10 responses



**Gambar 3. Pencatatan Laporan keuangan**  
Sumber: kuesioner (tanggapan *google form*)

Apakah UMKM Anda secara rutin membayar pajak sesuai ketentuan?

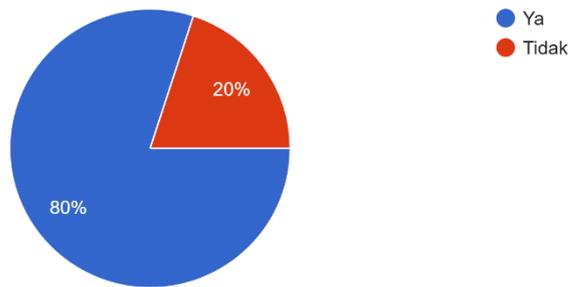
10 responses



**Gambar 4. Kepatuhan pajak**  
 Sumber: kuesioner (tanggapan *google form*)

Apakah Anda atau tim Anda pernah mengikuti pelatihan terkait sistem informasi manajemen atau sistem informasi secara umum?

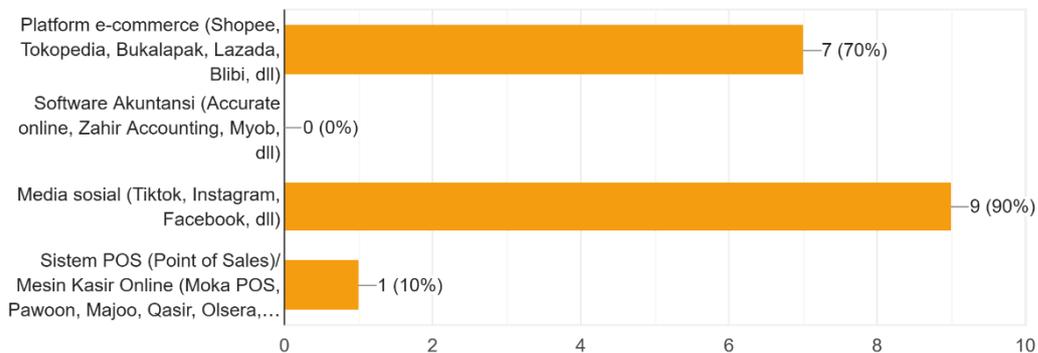
10 responses



**Gambar 5. Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan sejenisnya**  
 Sumber: kuesioner (tanggapan *google form*)

Alat digital apa saja yang sudah Anda gunakan dalam bisnis UMKM Anda? (jawaban boleh lebih dari 1 pilihan)

10 responses



**Gambar 6. Pengimplementasian Alat Digital Bisnis UMKM**  
 Sumber: kuesioner (tanggapan *google form*)

### Hasil wawancara

Hasil wawancara yang dilaksanakan di Kecamatan Banjarsari dan Jebres yang berada di Kota Surakarta. Narasumber yang bersedia menjadi informan untuk diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 3 pemilik UMKM yang telah mengisi *google form* dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh penulis. Hal ini bertujuan memudahkan ketika wawancara dilakukan. Informan lainnya adalah 2 orang perwakilan dari pemerintah yaitu dari PLUT Surakarta dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian.

### Analisis Informasi Akuntansi Manajemen

Wawancara dengan narasumber bernama Ibu Elliyina, pemilik usaha olahan kuliner untuk produk kemasan. Usaha sudah beroperasi sejak Maret 2018. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah Apakah UMKM Anda menerapkan akuntansi manajemen dalam operasional bisnis sehari-hari? Informan menyatakan bahwa telah menerapkan akuntansi manajemen dalam bentuk *cash in* dan *cash out* harian arus kas, kemudian pencatatan kartu piutang untuk mitra dan pencatatan persediaan bahan baku. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana peran akuntansi manajemen dalam membantu pengambilan keputusan strategis di perusahaan Anda? secara umum kartu piutang didigitalisasikan menjadi rekapan di dalam excel, kemudian ada 3 kolom terdiri dari kolom return, kolom kirim, dan kolom bayar. Pencatatan ini sangat membantu pencatatan kami, untuk menyeleksi mitra. Pertanyaan ketiga, apakah informasi dari akuntansi manajemen digunakan dalam merencanakan anggaran dan mengendalikan biaya? Bu Elli, menjawab “ya, dengan akuntansi manajemen bisa melakukan *forecasting* terkait kebutuhan bahan baku, jumlah mitra untuk mendistribusikan barang dengan mentarget penjualan tertentu dan melihat tren bulanan”. Saat ini, kami sedang mengefisienkan biaya bahan baku dengan membumbui sendiri, sehingga terjadi penghematan 10-20%/ kg bahan baku; pertanyaan selanjutnya, keempat, menurut Anda, sejauh mana akuntansi manajemen berkontribusi terhadap peningkatan kinerja bisnis Anda? Menurut Saya, “akuntansi itu jiwa dari sebuah bisnis, jika perhitungan tidak tepat, jika selisih terjadi, tidak bisa *saving*, dan problem lainnya, ketika memiliki catatan yang rapi, meningkatkan kinerja bisnis kuliner kami, untuk menghitung masa simpan produk di toko mitra”. Pertanyaan kelima, Apakah Anda menggunakan alat atau *software* tertentu dalam penerapan akuntansi manajemen? masih menggunakan rumus excel untuk mencatat piutang dan buku manual untuk pencatatan bahan baku.

Informan kedua adalah pemilik usaha dagang di bidang fesyen dan jual beli peralatan motor, bernama Pak Gunawan. Apakah UMKM Anda menerapkan akuntansi manajemen dalam operasional bisnis sehari-hari? Menurut Pak Gunawan, “Kami belum terpikirkan untuk saat ini dikarenakan usaha belum terlalu besar”. Namun, kami tetap mempertimbangkan kenaikan biaya dan hal ini mempengaruhi harga pokok penjualan. Kemudian, pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah, Lamikro, namun kemudia terkendala teknis, sehingga pencatatan tidak berlanjut. Menurut Pak Gunawan, pencatatan manual dalam buku catatan sederhana sudah dilakukan dan dibantu oleh anaknya dan sudah mendapatkan keuntungan yang mencukupi walau dirasa ke depan perlu melakukan pencatatan supaya rapi dan ketika dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan atau hibah bantuan pemerintah.

Informan ketiga, Bu Arsi, yang memiliki usaha pembuatan korset lumbal untuk pengobatan medis. Dengan pertanyaan yang sama. Menurut Bu Arsi, “saat ini Saya selaku *owner* sudah melakukan pencatatan sederhana dengan aplikasi akuntansi tidak berbayar”. Penjualan sudah dilakukan di *market place*. “Kami telah menyusun penganggaran pendapatan dan biaya secara sederhana”. Menurut Saya, “akuntansi lumayan membantu perkembangan usaha kami, karena bisa memperhitungkan bahan baku, namun saat ini kami perlu pelatihan tip dan trik penjualan digital (*e-commerce*)”.

Informan keempat, Pak Teguh dari PLUT, pertanyaan yang diajukan penulis adalah apakah dinas melihat ada pengaruh positif terhadap produktivitas UMKM yang menerapkan akuntansi manajemen secara konsisten? Program apa saja yang dimiliki oleh dinas untuk mendukung UMKM dalam penerapan akuntansi manajemen? Pak Teguh menyampaikan bahwa, persoalan di UMKM kompleks mencakup permasalahan utama seperti permodalan, pemasaran, SDM,

keuangan, dan legalitas. Menurut saya, “umkm pada kenyataannya asal modal bisa diputar, usaha sudah berjalan, namun akuntansi di UMKM bagaikan darah yang harus dijaga sirkulasinya yaitu dengan melakukan pencatatan keuangan seperti, harga pokok produksi/ penjualan, sistem pencatatan akuntansi”. Dinas melakukan pelatihan-pelatihan tergantung kebutuhan UMKM, seperti pembukuan sederhana, sosialisasi pencatatan keuangan dan keuntungan dari pencatatan, dan bagaimana melakukan pencatatan dengan benar. Supaya efektif, menurutnya, dilakukan praktik seperti implementasi Lamikro, SiApik, akun.biz bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait. Hal ini menurutnya, untuk tujuan pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan (Bank).

Informan kelima, Pak Bhayu dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, terkait program apa saja yang dimiliki oleh dinas untuk mendukung UMKM dalam penerapan akuntansi manajemen dan kepatuhan pajak? menurut Pak Bhayu, “hal ini terkait kewenangan bahwa akuntansi menjadi bagian yang merupakan privasi (dapur) dari UMKM sendiri, namun dinas berusaha memfasilitasi berupa pameran, bimbingan teknis, pendampingan dan pelatihan diversifikasi produk, pelatihan ekspor impor, dan pelatihan wawasan pariwisata untuk mengembangkan usaha pelaku industri”.

### **Biaya Kepatuhan Pajak**

Informan pertama, penulis mengajukan pertanyaan terkait seberapa besar pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap keuangan UMKM Anda? Bu Elliyina menyampaikan bahwa secara umum, “Saya merasa belum cukup berpengaruh karena omzet dan perputarannya masih kecil”. Apakah Anda menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan? Saya selaku *owner* menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban, “Saya dibantu konsultan untuk membantu pengelolaan pajak jadi kami terkena pajak 0,5% karena berbentuk CV, ke depan perlu mencatat penjualan secara detail”. Berapa biaya yang dikeluarkan setiap tahun untuk memastikan kepatuhan pajak? secara umum, sebagai wajib pajak badan, usaha Kami sudah melaporkan kewajiban pajak, jika kepatuhan pajak terhadap karyawan, belum dilakukan, baik karyawan tetap maupun *freelance* belum dipatok sebagai mana gaji UMR Solo. Jika karyawan dipotong pajak penghasilan, maka akan mengurangi kesejahteraan karyawan. Menurut Anda, apakah biaya kepatuhan pajak terlalu tinggi atau sebanding dengan manfaatnya? Saya kurang tahu apakah ini tinggi, sebanding atau tidak, jadi Saya sebatas mengetahui bahwa pajak itu sebagai kewajiban warga ke negara, tetapi tidak tahu manfaat pajak itu apa? Karena jarang ada sosialisasi atau informasi atau transparansi pemerintah terkait uang pajak rinciannya seperti apa?

Informan kedua, Pak Gunawan menyampaikan bahwa “Saya memiliki NPWP Pribadi, namun omzet kami belum sampai jumlah PTKP”. Sesuai aturan, UMKM di Indonesia bisa tidak terkena pajak apabila omzetnya rendah sehingga pendapatan bersihnya masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk individu, yaitu Rp54 juta per tahun (atau Rp4,5 juta per bulan).

Informan ketiga, Bu Arsi, memberikan pernyataan yang sama dengan Bu Elliyina, yaitu sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurutnya, “Kami melihat pajak yang dibayarkan oleh UMKM menambah pendapatan negara, yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, dan layanan kesehatan”. Penerimaan ini menjadi basis bagi pemerintah dalam menyediakan layanan dan fasilitas bagi masyarakat luas.

Informan keempat, Pak Teguh, penulis menanyakan Apakah ada target tertentu dari dinas untuk meningkatkan jumlah UMKM yang patuh pajak dan memiliki akuntansi yang tertib? menurut Pak Teguh, “kewenangan pajak ada di otoritas utama dalam pengenaan pajak untuk UMKM ada pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan”. Dari PLUT, hanya mendukung aspek administrasi dan pendampingan seperti memberikan sosialisasi perpajakan berkerjasama dengan DJP Surakarta. Menurutnya, UMKM dapat tereduksi pajak jika terdapat beberapa faktor pendukung yang memfasilitasi pemahaman dan kesadaran mereka mengenai kewajiban perpajakan. Menurutnya, beberapa faktor penting yang dapat mendukung edukasi pajak bagi UMKM antara lain sosialisasi dan penyuluhan dari Pemerintah serta Sistem Pembayaran Pajak yang Sederhana.

Informan kelima, Pak Bhayu sependapat dengan Pak Teguh, bahwa kewenangan sosialisasi dan kesadaran pajak terletak pada DJP. Pak Bhayu menyatakan bahwa “jika pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyatnya terlebih dahulu dengan memberikan fasilitas kemudahan bagi UMKM seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), keringanan kredit usaha, program promosi dan pemasaran produk UMKM, dukungan dalam bentuk edukasi, fasilitas informasi, serta sistem yang mudah, sehingga UMKM akan lebih sadar dan paham tentang kewajiban pajaknya, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. maka pembayaran pajak menjadi efektif”.

### **Pembahasan Hasil Wawancara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pernyataan dari Pak Gunawan berlawanan dengan penelitian Oats & Tuck (2019), yang mana omzet tidak cukup untuk memenuhi aspek biaya kepatuhan pajak dikarenakan masih dibawah PTKP yang mana tingkatan usaha yang masih tergolong mikro, namun beliau sudah memiliki konsep strategi penjualan yang telah diperoleh dari pendampingan dari PLUT sehingga mampu menerapkan penjualan secara online dan telah menerapkan diversifikasi produk.

Sebaliknya, fakta lain terungkap dari pernyataan Bu Elliyina dan Bu Arsi, yang konsisten dengan hasil penelitian Oats & Tuck (2019) dan Oyewo (2022) yang menjelaskan wajib pajak yang taat pembayaran pajaknya. Pernyataan keduanya, mengungkapkan bahwa usaha yang sudah dikelola telah memenuhi kewajiban perpajakan walau baru sebatas laba atas pajak badan, belum membayarkan pajak penghasilan dari karyawannya. Hal ini dikarenakan jumlah gaji karyawan yang masih di bawah gaji UMR yang berlaku. Keduanya, telah mendapatkan sosialisasi perpajakan dari kanwil DJP melalui kegiatan yang bekerjasama dengan Dinas terkait.

Pernyataan Pak Teguh dan Pak Bhayu, seiring menunjukkan bahwa telah ada upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan ke UMKM, baik pemasaran, pelaporan keuangan, dan tentunya perpajakan dengan menggandeng Kanwil Dirjen Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa PLUT dan Dinkopperin sebagai pelayan masyarakat telah memberikan bimbingan dan solusi terkait pengembangan usaha dan strategi kompetitif meliputi diversifikasi dan pengemasan produk yang merupakan salah satu bagian dari akuntansi manajemen, yang mana sesuai dengan teori dalam penelitian (Bellamy et al., 2019).

Berdasarkan pembahasan di atas, hal tersebut sesuai teori kontingensi bahwa cara untuk membuat sistem akuntansi manajemen tidak hanya dengan satu pendekatan. Teori kontingensi membantu hal tersebut dikarenakan desain sistem harus mempertimbangkan aspek organisasi dan lingkungan khusus seperti ukuran, kompleksitas, atau tingkat regulasi pajak yang dihadapi UMKM, dengan tujuan meminimalkan biaya kepatuhan pajak.

## **PENUTUP**

Penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan meliputi aspek akuntansi manajemen yaitu terdapat UMKM yang sudah menerapkan konsep akuntansi manajemen meliputi penghitungan biaya pokok produk dan pengembangan strategi usaha terkait pengolahan dan pemasarannya, namun juga ada UMKM yang masih merasa nyaman dan tidak perlu melakukan pengembangan, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya informasi dalam menggunakan konsep ini. Aspek biaya kepatuhan pajak, bahwa UMKM yang sudah berkembang dengan baik sudah memiliki kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajaknya. Walaupun secara omzet belum mencukupi untuk melakukan pembayaran pajak karyawannya dikarenakan jumlah karyawan yang masih terbatas dan gajinya di bawah UMR. Sistem akuntansi dan praktik pencatatan yang tepat tidak hanya memfasilitasi kepatuhan pajak, tetapi juga memungkinkan pemilik dan manajer UKM untuk membuat keputusan yang tepat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kinerja keuangan dan bisnis secara keseluruhan. Praktik akuntansi manajemen yang efektif, seperti penganggaran, analisis biaya, dan pelaporan keuangan, dapat memberi UKM wawasan yang

diperlukan untuk mengidentifikasi area efisiensi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan profitabilitas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak signifikan dari biaya kepatuhan pajak terhadap kinerja keuangan UMKM. UMKM yang mampu menavigasi kompleksitas peraturan perpajakan dan memelihara catatan yang akurat lebih mungkin untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, yang pada gilirannya berdampak positif pada posisi keuangan mereka. Beban kepatuhan pajak yang tinggi dapat menurunkan kinerja UMKM dengan mengurangi modal yang tersedia untuk investasi atau pengembangan usaha. Sebaliknya, sistem pajak yang lebih sederhana dan efisien dapat membantu mengurangi biaya kepatuhan dan mendorong UMKM untuk berkinerja dan menunjukkan akuntabilitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alawattage, C., & Wickramasinghe, D. (2022). Strategising management accounting: liberal origins and neoliberal trends. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 35(2), 518–546. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2021-5124>
- Alsharari, N. M., & Lasyoud, A. A. (2019). Is Traditional Management Accounting Still in Use? Contemporary Issues. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 229–240. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.14153>
- Anesa, M., & Bressan, A. (2024). SMEs tax minimization as shared responsibility. *Critical Perspectives on Accounting*, 98. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2023.102698>
- Azmi, A., Sapiei, N. S., Mustapha, M. Z., & Abdullah, M. (2016). SMEs' tax compliance costs and IT adoption: the case of a value-added tax. *International Journal of Accounting Information Systems*, 23, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2016.06.001>
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2024). Profil Industri Mikro dan Kecil Kota Surakarta 2022. <https://surakartakota.bps.go.id/id/publication/2024/02/13/>
- Barrios, S., d' Andria, D., & Gesualdo, M. (2020). Reducing tax compliance costs through corporate tax base harmonization in the European Union. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 41. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100355>
- Bellamy, L. C., Amoo, N., Mervyn, K., & Hiddlestone-Mumford, J. (2019). The use of strategy tools and frameworks by SMEs in the strategy formation process. *International Journal of Organizational Analysis*, 27(2), 337–367. <https://doi.org/10.1108/IJOA-02-2018-1363>
- Binus University. (2020). Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia.
- Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: memilih di antara 5 Pendekatan* (3rd ed.). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghasemi, R., Mohamad, N. A., Karami, M., Bajuri, N. H., & Asgharizade, E. (2016). The mediating effect of management accounting system on the relationship between competition and managerial performance. *International Journal of Accounting and Information Management*, 24(3), 272–295. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2015-0030>
- Hadid, W., & Al-Sayed, M. (2021). Management accountants and strategic management accounting: The role of organizational culture and information systems. *Management Accounting Research*, 50. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2020.100725>
- Halabi, A. K., Dyt, R., & Barrett, R. (2010). Understanding financial information used to assess small firm performance: An Australian qualitative study. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 7(2), 163–179. <https://doi.org/10.1108/11766091011050840>
- Hansen, D. R., & Mowen, M. (2015). *Akuntansi Managerial*. Salemba Empat.
- Hasan, I., Hoi, C. K. (Stan), Wu, Q., & Zhang, H. (2014). Beauty is in the eye of the beholder: The effect of corporate tax avoidance on the cost of bank loans. *Journal of Financial Economics*, 113(1), 109–130. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.03.004>

- Latif, S., Izani Mohd Salleh, S., Abd. Ghani, M., & Ahmad, B. (2023). Management accounting systems and economic sustainability: a qualitative inquiry of SMEs in Pakistan. *Asian Review of Accounting*, 31(3), 367–386. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2022-0123>
- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance: is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, 49(5), 565–583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- Oyewo, B. (2022). Contextual factors moderating the impact of strategic management accounting on competitive advantage. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(5), 921–949. <https://doi.org/10.1108/JAAR-04-2021-0108>
- Panggiarti, E. K., Sarfiah, S. N., & Laut, L. T. (2023). Peran Akuntansi Manajemen dan Biaya Kepatuhan Pajak bagi Kinerja UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(3), 636–652.
- Primasasti, A. (2023, July 11). Perkembangan UMKM di Kota Solo dan Dukungan Pemerintah. Website Pemerintah Kota Surakarta. <https://surakarta.go.id/?p=29397>
- Qiu, F., Hu, N., Liang, P., & Dow, K. (2023). Measuring management accounting practices using textual analysis. *Management Accounting Research*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2022.100818>
- Refiyanto, E., & Muid, D. (2022). Analisis Penggunaan Informasi Dan Penerapan Akuntansi Manajemen Terhadap Strategi Pengembangan UMKM Kota Bontang. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rengganis, D., & Soetardjo, M. N. (2023). The Effect of Tax Planning and Current Tax Expense on Earnings Management Before and After Income Tax Rate Changes. *Proceeding of 3rd International Conference on Entrepreneurship (IConEnt)*
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yong, S., & Fukofuka, P. (2023). Accounting, tax compliance and New Zealand indigenous entrepreneurs: a Bourdieusian perspective. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 36(5), 1350–1378. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2017-3273>
- Zaid, W. M. A., & Yaqub, M. Z. (2024). The prolificacy of green transformational leadership in shaping employee green behavior during times of crises in small and medium enterprises: a moderated mediation model. *Frontiers in Psychology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1258990>